

LAPORAN EVALUASI

**Rencana Tindak Pengendalian
Risiko Strategis Dinas Pekerjaan Umum
Tahun 2023**

Penetapan Nomor : 050 / / 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PEKERJAAN UMUM

DAFTAR ISI

REVIEW RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS.....	1
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Ruang Lingkup	2
II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2023	3
A. Rencana Pengelolaan Risiko Strategis Dinas PU Tahun 2023.....	3
B. Realisasi Pengelolaan Risiko Dinas PU Tahun 2023	5
C. Hambatan Pelaksanaan kegiatan	6
D. Monitoring Risiko dan RTP Dinas PU Tahun 2023.....	7
E. Laporan Hasil Evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Terhadap Risiko Kecurangan (FRA) pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 7	
III. PENUTUP	9

REVIEW RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan *good governance* sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan Negara / daerah. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas sebagai salah satu OPD pada Pemerintah Kabupaten Banyumas, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas sedang, dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Peraturan Kepala BPKP nomor 05 Tahun 2021 tentang penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi.
4. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2023 tentang Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah.
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilakukannya Pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk mengelola risiko yang mendukung pencapaian tujuan pemerintah Daerah melalui identifikasi, analisis dan pengendalian risiko serta pemantauan aktivitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah Daerah. Penyusunan laporan pengelolaan risiko bertujuan sebagai alat untuk memantau proses pengelolaan risiko strategis selama Tahun 2023.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan pengelolaan risiko ini adalah pengelolaan risiko sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas selama Tahun 2023.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2023

A. Rencana Pengelolaan Risiko Strategis Dinas PU Tahun 2023

Pelaporan pengelolaan risiko Strategis Tahun 2023 bertujuan untuk mengetahui apakah risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis benar-benar terjadi dan apakah rencana pengendalian untuk mengurangi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko telah efektif. Hal ini sangat penting sebagai bahan kajian untuk mengelola risiko Tahun 2023. Pelaporan dilakukan dengan pengisian form 8, 9 dan 10 pada dokumen RTP Tahun 2023.

Jumlah risiko yang teridentifikasi setelah dimutakhirkan sebanyak 7 risiko strategis dan 22 risiko operasional dengan jumlah risiko prioritas yang terpilih untuk disusun rencana tindak pengendaliannya sebanyak 7 RTP pada risiko strategis dan RTP pada 9 risiko operasional. Permutakhiran risiko dilakukan sebagai bentuk persiapan dalam penilaian maturitas SPIP, sehingga diperlukan untuk merevisi risiko dengan memasukkan risiko kemitraan dan kecurangan, serta dikaitkan dengan tema risiko pariwisata.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) atas risiko strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas selama tahun 2023 yang telah disusun pada form 7 dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Rencana Tindak Pengendalian Atas Risiko Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banyumas Tahun 2023

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian yangmSudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	Bertambahnya kerusakan Gedung Pemerintahan Daerah	Pembaharuan database kerusakan bangunan gedung pemerintah, prioritas penanganan	KE	Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas	Optimaliasasi penanganan, usulan penambahan anggaran, mencari sumber pendanaan di Provinsi atau pusat untuk penanganan infrastruktur Bangunan Gedung	Kepala Dinas PU	Triwulan IV 2023
2	Adanya resiko meningkatnya kerusakan infrastruktur irigasi	Menyusun database kondisi jaringan irigasi, prioritas penanganan dan meningkatkan kualitas perencanaan teknis	E	Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas	Pembaharuan database kondisi jaringan irigasi, prioritas penanganan dan meningkatkan kualitas SDM perencana	Kepala Dinas PU; Kepala Bidang SDAI	Triwulan IV 2023
3	Terdapat wilayah yang belum terkoneksi oleh jalan kondisi baik	Survey Kondisi Jalan, Optimalisasi database kerusakan Jalan, prioritas penanganan	E	Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas	Update data Jalan Kabupaten, Optimalisasi Prioritas penanganan, UPTD Teknis	Kepala Dinas PU	Triwulan IV 2023
4	Terdapat Penyedia Jasa Konstruksi yang kurang mendapat pembinaan	Pelatihan tenaga terampil Konstruksi	KE	Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas	Pembuatan SOP pengelolaan SI	Kepala Dinas PU	Triwulan IV 2023
5	Meningkatnya kerusakan jaringan drainase	Optimalisasi database kerusakan, prioritas penanganan, Koordinasi lintas bidang terakit	KE	Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas	Pembuatan data genangan, Optimalisasi Prioritas penanganan, UPTD Teknis	Kepala Dinas PU	Triwulan IV 2023
6	Terdapat wilayah potensi rawan longsor	Optimalisasi database rawan bencana, prioritas penanganan, Pembentukan Satgas TRC, Penanganan darurat	KE	Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas	Optimalisasi Prioritas penanganan, mengaktifkan TRC, UPTD Teknis pada wilayah rawan longsor	Kepala Dinas PU	Triwulan IV 2023

Sumber: Aplikasi MRI, 2023

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/daerah yang diamanatkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Realisasi Pengelolaan Risiko Dinas PU Tahun 2023

Dengan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang telah direncanakan tahun 2023 seperti pada tabel 1 di atas, terdapat beberapa perbedaan kegiatan pengendalian yang dilaksanakan, namun kegiatan pengendalian tersebut masih mendukung kegiatan pengendalian yang direncanakan. Beberapa kegiatan pengendalian yang berbeda tersebut antara lain:

Tabel 2. 2. Perbedaan Rencana Kegiatan Pengendalian dengan Realisasi Kegiatan Pengendalian Risiko Pemkab Tahun 2023

No	Rencana Kegiatan Pengendalian	Realisasi Kegiatan Pengendalian
1.	Optimaliasasi penanganan, usulan penambahan anggaran, mencari sumber pendanaan di Provinsi atau pusat untuk penanganan infrastruktur Bangunan Gedung	Optimaliasasi penanganan dan usulan penambahan anggaran untuk penanganan infrastruktur Bangunan Gedung
2.	Pembaharuan database kondisi jaringan irigasi, prioritas penanganan dan meningkatkan kualitas SDM perencana	Pembaharuan database kondisi jaringan irigasi dan prioritas penanganan

No	Rencana Kegiatan Pengendalian	Realisasi Kegiatan Pengendalian
3.	Update data Jalan Kabupaten, Optimalisasi Prioritas penanganan, UPTD Teknis	Update data Jalan Kabupaten dan Optimalisasi Prioritas penanganan
4.	Pembuatan SOP pengelolaan SI	Pengelolaan Sistem Informasi (SIPJAKI)
5.	Pembuatan data genangan, Optimalisasi Prioritas penanganan, UPTD Teknis	Optimalisasi Prioritas penanganan
6.	Optimalisasi Prioritas penanganan, mengefektifkan TRC, UPTD Teknis pada wilayah rawan longsor	Mengefektifkan TRC dan UPTD Teknis pada wilayah rawan longsor

Selama Triwulan I s.d. Triwulan IV Tahun 2023 terdapat beberapa risiko teridentifikasi yang terjadi, yaitu :

1. Terdapat wilayah yang belum terkoneksi oleh jalan kondisi baik, yang terjadi pada Triwulan II yang disebabkan Terdapat 7 wilayah yang belum terkoneksi jalan kondisi baik dan sudah dilakukan tindak pengendalian berupa Data Kondisi Jalan sudah diperbaharui, Peran TRC sudah cukup efektif dan Optimalisasi anggaran sudah dilakukan saat perubahan APBD.
2. Meningkatnya kerusakan jaringan drainase, yang terjadi pada Triwulan II yang disebabkan Persentase panjang jaringan drainase kondisi baik sebesar 75,70% (113,8316 KM) dan berdampak pada terjadinya Potensi rawan genangan. Adapun tindak pengendalian yang sudah dilakukan adalah Optimalisasi penanganan sudah dilaksanakan dan Peran UPTD teknis sudah berjalan, pembuatan data genangan dijadwalkan ulang pada tahun 2024 dan total penanganan yang sudah dilakukan adalah sepanjang 4301.4 Meter.
3. Terdapat Obyek wisata yang belum terkoneksi oleh jalan kondisi baik (mendukung Aspek Destinasi Pariwisata), yang disebabkan kerusakan pada Jalan Akses Wisata Karanglo - Cipendok (No. Ruas 74) dan Jalan Baturraden - Serang (No. Ruas 62) sehingga berdampak pada terganggunya akses menuju OW Baturraden dan OW Curug Cipendok, adapun tindak pengendalian yang sudah dilakukan adalah penyelesaian rekonstruksi akses jalan menuju Objek Wisata (al. Peningkatan Jalan Akses Wisata Karanglo - Cipendok, Peningkatan Jalan Baturraden - Serang).

C. Hambatan Pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengendalian atas risiko yang telah disusun tidak terjadi hambatan/kendala yang berarti, meskipun dalam realisasinya terdapat beberapa kegiatan pengendalian yang berbeda dengan rencana kegiatannya dan perubahan realisasi waktu pelaksanaan kegiatan pengendalian tersebut pada tahun 2023, serta terdapat kegiatan pengendalian yang tidak dilaksanakan di

tahun 2023 karena anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengendalian tersebut sangat besar dan keterbatasan waktu. Namun, tidak berdampak besar terhadap pencapaian tujuan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan pengendalian yang berubah, dan kegiatan pengendalian yang tidak dilakukan pada tahun 2023 direncanakan akan dilakukan pada tahun selanjutnya.

D. Monitoring Risiko dan RTP Dinas PU Tahun 2023

Berdasarkan Surat Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas nomor 700/081.PKPT/168/IRBAN.4/ST.037/2023 tanggal 19 Juni 2023 perihal Laporan Hasil evaluasi RTP Tahun 2022 dan Review RR Tahun 2023 pada dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas dengan hasil bahwa RTP Tahun 2023 belum diformalkan dan masih dalam bentuk konsep. Selain itu, dalam konsep tersebut belum disusun sesuai standar dan ketentuan yang berlaku dan belum dilampiri dengan kelengkapan dokumen berupa Formulir 1 sampai dengan Formulir 10.

Adapun hasil simpulan LHE tersebut bahwa Secara umum proses penyusunan RR RTP Tahun 2023 pada Dinas PU belum sepenuhnya dilakukan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku dan masih terdapat kekurangan dan catatan yang perlu dicermati dan ditindaklanjuti untuk memperbaiki pengelolaan Risiko dan penyelenggaraan SPIP secara umum.

Sebagai tindak lanjut LHE tersebut maka Dinas PU telah menyusun dan memformalkan Dokumen RTP Tahun 2023 lengkap beserta lampiran formulir 1 sampai dengan formulir 10.

E. Laporan Hasil Evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Terhadap Risiko Kecurangan (FRA) pada Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2023

Berdasarkan Surat BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah nomor PE.05.03/LHP-453/PW11/5.2/2023 tanggal 20 Juli 2023 perihal Laporan Hasil Penilaian Risiko Kecurangan (Fraud Risk Assessment) pada Pemerintah Kabupaten Banyumas, dimana Dinas PU menjadi sample, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Uraian Hasil Penyusunan Profil Risiko Kecurangan

Berdasarkan proses identifikasi risiko fraud yang telah dilakukan pada tujuh Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Banyumas, diperoleh hasil sebanyak 20 risiko fraud pada Inspektorat Daerah, 22 risiko fraud pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, 20 risiko fraud pada Dinas Pemuda, Olahraga,

Kebudayaan, dan Pariwisata, **24 risiko fraud pada Dinas Pekerjaan Umum**, 23 risiko fraud pada Dinas Pendidikan, 20 risiko fraud pada Dinas Kesehatan, serta 15 risiko fraud pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, sehingga jumlah risiko fraud teridentifikasi sebanyak 144 risiko fraud.

Sehingga Dinas PU memiliki Profil Risiko kecurangan tertinggi dibanding OPD sample yang lain.

2. Peta Risiko Kecurangan

Peta Risiko dalam penyusunan Profil Risiko Kecurangan pada Dinas PU disajikan sebagai berikut:

Matriks Analisis Risiko 5x5			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	0	0	0	0	0
	4	Sering Terjadi	0	0	0	0	0
	3	Kadang terjadi	0	0	0	4	2
	2	Jarang Terjadi	0	0	0	6	10
	1	Hampir Tidak Pernah Terjadi	0	0	0	2	0

III. PENUTUP

Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2023 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh Pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penerapan pengelolaan risiko strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas pada tahun 2023 sudah dilaksanakan dengan baik dan berdasarkan hasil monitoring kegiatan pengkomunikasian risiko/RTP (Form 8), kegiatan pemantauan terhadap RTP (Form 9), dan keterjadian risiko (Form 10) menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun terdapat beberapa RTP yang tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran dan keterjadian risiko masih terjadi yang disebabkan oleh kegiatan pengendalian yang tidak dilaksanakan dan kurang efektifnya pelaksanaan kegiatan pengendalian yang telah disusun.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas harus terus melakukan monitoring pengelolaan risiko periode selanjutnya secara lebih intensif dan berkala dengan lebih baik lagi agar tidak terjadi risiko yang mengganggu pencapaian tujuan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, serta berkoordinasi dengan Unit Pemilik Risiko (UPR) pada masing-masing bidang dalam pengelolaan risiko strategis maupun operasional OPD dengan lebih baik lagi.

Purwokerto, 10 Januari 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Banyumas



KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO, ST, M.Si.
NIP. 19671229 199002 1 002

Lampiran I

Tabel Informasi dan Komunikasi Risiko dan RTP Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2023

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan				Realisasi Waktu Pelaksanaan				Keterangan	
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		
a	b	c	d	e	f				g				h	
1	Optimalisasi penanganan; usulan penambahan anggaran; mencari sumber pendanaan di Provinsi atau pusat untuk penanganan infrastruktur Bangunan Gedung	Rapat Koordinasi	DPU, UPTD, BAPPEDALITBANG, BKAD.	DPU, UPTD DPU	Triwulan II Tahun 2023					Triwulan II Tahun 2023				Usulan anggaran Bangub dan DAK
2	Pembaharuan database kondisi jaringan irigasi, prioritas penanganan dan meningkatkan kualitas SDM perencana	Rapat Koordinasi; Rapat Pembaharuan Database Irigasi	Dinas PU, Bidang Teknis; UPTD Wilayah Dinas PU	Dinas PU, Bidang Teknis; UPTD Wilayah Dinas PU	Triwulan IV tahun 2023							Triwulan III	Triwulan IV	Database kondisi irigasi telah diperbaharui sesuai kondisi akhir tahun 2023. Prioritas penanganan telah dilaksanakan sesuai ketersediaan anggaran. Sedangkan peningkatan kualitas SDM perencana akan disesuaikan peluang Diklat/Bintek pada kementerian PUPR
3	Update data kondisi Jalan Kabupaten; Optimalisasi Prioritas penanganan; Memaksimalkan	Rapat Koordinasi; Rapat Koordinasi Pembaharuan Database Jalan;	DPU, Bidang Perencanaan dan Pembangunan Jalan, Bidang Pemeliharaan dan Monev Jalan, UPTD DPU	DPU, Bidang Perencanaan dan Pembangunan Jalan, Bidang Pemeliharaan	Triwulan IV Tahun 2023								Triwulan IV	Update data kondisi Jalan Kabupaten telah dilaksanakan (Konsultansi); Optimalisasi Prioritas penanganan telah

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan				Realisasi Waktu Pelaksanaan				Keterangan
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
a	b	c	d	e	f				g				h
	peran TRC di UPTD Wilayah			dan Monev Jalan, UPTD DPU									dilaksanakan sesuai ketersediaan anggaran; Peran TRC di UPTD Wilayah
4	Pembuatan SOP Pelatihan / Pembinaan Jasa Konstruksi; pengelolaan SI Jasa Konstruksi;	Rapat Koordinasi; Dokumen SOP; Surat Undangan	DPU, Bidang Drainase dan Bina Jasa Konstruksi	DPU, Bidang Drainase dan Bina Jasa Konstruksi, Tenaga Terampil Konstruksi	Triwulan IV Tahun 2023				Triwulan I Mengundang Peserta Pelatihan				Pengelolaan SI jasa Konstruksi (SIPJAKI) sudah berjalan
5	Pembuatan data genangan, Optimalisasi Prioritas penanganan, UPTD Teknis	Rapat Koordinasi	Dinas PU, Bidang Drainase dan Bina Jasa Konstruksi; UPTD Dinas PU	Dinas PU, Bidang Drainase dan Bina Jasa Konstruksi; UPTD Dinas PU	Triwulan IV Tahun 2023				Triwulan IV Tahun 2023				Optimalisasi telah dilaksanakan sesuai ketersediaan anggaran dengan melibatkan UPTD teknis dalam pemantauan lapangan. Sedangkan pembuatan data genangan direncanakan pada tahun 2024 dengan pertimbangan ketersediaan anggaran
6	Optimalisasi Prioritas penanganan; mengefektifkan TRC pada UPTD Teknis pada wilayah rawan longsor	Rapat Koordinasi/Apel Siaga Bencana	DPU, UPTD DPU	DPU, UPTD DPU				Triwulan IV 2023			Triwulan IV : Apel siaga bencana (DPU)	Triwulan IV : Apel siaga bencana (DPU dan UPTD)	

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan				Realisasi Waktu Pelaksanaan				Keterangan
					TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
a	b	c	d	e	f				g				h
7	Update data Jalan Kabupaten, Optimalisasi Prioritas penanganan, Optimalisasi peran UPTD Teknis	Rapat koordinasi; Rapat koordinasi pemutakhiran Kondisi Jalan	Dinas PU; Bidang Perencanaan dan Pembangunan Jalan; Bidang Pemeliharaan dan Monev Jalan; UPTD Teknis	Dinas PU; Bidang Perencanaan dan Pembangunan Jalan; Bidang Pemeliharaan dan Monev Jalan; UPTD Teknis			Rapat Koordinasi	Rapat koordinasi pemutakhiran Kondisi Jalan				Rapat koordinasi Akses jalan menuju OW	

Lampiran II

Tabel Pemantauan Atas Kegiatan Pengendalian Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2023

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan				Realisasi Waktu Pemantauan				eterangan
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
a	b	c	d	e				f				h
1	Optimalisasi penanganan; usulan penambahan anggaran; mencari sumber pendanaan di Provinsi atau pusat untuk penanganan infrastruktur Bangunan Gedung	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan baik elektronik/WAG ataupun tertulis	Kepala Bidang Penataan Bangunan	Triwulan IV Tahun 2023				Triwulan IV Tahun 2023				Sudah dilaksanakan, penanganan sudah mengacu pada prioritas dengan memaksimalkan anggaran tersedia, dan sudah diupayakan juga usulan-usulan ke pemerintah provinsi dan pusat.
2	Pembaharuan database kondisi jaringan irigasi, prioritas penanganan dan meningkatkan kualitas SDM perencana	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan baik elektronik/WAG ataupun tertulis	Kepala Bidang SDA dan irigasi	Triwulan IV Tahun 2023				Triwulan IV				Database kondisi irigasi telah diperbaharui sesuai kondisi akhir tahun 2023. Prioritas penanganan telah dilaksanakan sesuai ketersediaan anggaran. Sedangkan peningkatan kualitas SDM perencana akan disesuaikan peluang Diklat/Bintek pada kementerian PUPR

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan				Realisasi Waktu Pemantauan				eterangan
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
a	b	c	d	e				f				h
3	Update data kondisi Jalan Kabupaten; Optimalisasi Prioritas penanganan; Memaksimalkan peran TRC di UPTD Wilayah	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan baik elektronik/WAG ataupun tertulis	Kepala Dinas Pu; Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Jalan; Kepala Bidang Pemeliharaan dan Monev Jalan	Triwulan IV Tahun 2023				Triwulan I, II, III, IV Tahun 2023				Data kondisi jalan terbaru sudah tersedia dan penanganan sudah sesuai prioritas.
4	Pembuatan SOP Pelatihan / Pembinaan Jasa Konstruksi; pengelolaan SI Jasa Konstruksi;	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan baik elektronik/WAG ataupun tertulis	Kepala Bidang Drainase dan Jasa Konstruksi	Triwulan IV Tahun 2023				Triwulan I, II, III, IV Tahun 2023				Pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi telah dilaksanakan. Sedangkan pembuatan SOP masih dalam proses pencarian rujukan yang sesuai dan akan diselesaikan pada tahun 2024.
5	Pembuatan data penanganan, Optimalisasi Prioritas penanganan, UPTD Teknis	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan baik elektronik/WAG ataupun tertulis	Kepala Bidang Drainase dan Jasa Konstruksi	Triwulan IV Tahun 2023				Triwulan IV				Optimalisasi telah dilaksanakan sesuai ketersediaan anggaran dengan melibatkan UPTD teknis dalam pemantauan lapangan. Sedangkan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan				Realisasi Waktu Pemantauan				Keterangan
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	
a	b	c	d	e				f				h
												pembuatan data genangan direncanakan pada tahun 2024 dengan pertimbangan ketersediaan anggaran
6	Optimalisasi Prioritas penanganan; mengaktifkan TRC pada UPTD Teknis pada wilayah rawan longsor	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan baik elektronik/WAG ataupun tertulis	Kepala Dinas PU	Triwulan IV 2023				Triwulan I, II, III, IV 2023				TRC pada UPTD Dinas PU telah efektif berperan dalam penanganan bencana
7	Update data Jalan Kabupaten, Optimalisasi Prioritas penanganan, Optimalisasi peran UPTD Teknis	Rapat koordinasi; Perencanaan penanganan; Penanganan Fisik	Kepala Dinas PU; Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Jalan; Kepala Bidang Pemeliharaan dan Monev Jalan	Perencanaan	Persiapan	Pelaksanaan Fisik	Pemantauan	Perencanaan	Persiapan	Pelaksanaan Fisik	Pemantauan	Tahap Perencanaan s/d Pemantauan pekerjaan fisik telah dilaksanakan pada akses jalan menuju Objek Wisata (al. Peningkatan Jalan Akses Wisata Karanglo - Cipendok, Peningkatan Jalan Baturraden - Serang)

Lampiran III

Tabel Keterjadian Risiko Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2023

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
1	Bertambahnya kerusakan Gedung Pemerintahan Daerah	RSO.21..06.06					Optimalisasi penanganan; usulan penambahan anggaran; mencari sumber pendanaan di Provinsi atau pusat untuk penanganan infrastruktur Bangunan Gedung	Triwulan IV 2023	TW IV	Optimalisasi penanganan sudah dilakukan, dan usulan pendanaan dari luar Pemda Banyumas juga sudah dilakukan
2	Adanya resiko meningkatnya kerusakan infrastruktur irigasi	RSO.21..06.06					Pembaharuan database kondisi jaringan irigasi, prioritas penanganan dan meningkatkan kualitas SDM perencana	Triwulan IV 2023	TW IV	Database kondisi jaringan irigasi sudah diperbaharui, prioritas penanganan sudah di dilakukan saat Perubahan APBD dan peningkatan kualitas SDM perencana sudah dilakukan
3	Terdapat wilayah yang belum terkoneksi oleh jalan kondisi baik	RSO.21..06.06	30/06/2023	Terdapat 7 wilayah yang belum terkonksi jalan kondisi baik	Akses masyarakat terganggu		Update data kondisi Jalan Kabupaten; Optimalisasi Prioritas penanganan; Memaksimalkan peran TRC di UPTD Wilayah	Triwulan IV 2023	TW IV	Data Kondisi Jalan sudah diperbaharui, Peran TRC sudah cukup efektif dan Optimalisasi anggaran sudah dilakukan saat perubahan APBD

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksana an RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
4	Terdapat Penyedia Jasa Konstruksi yang kurang mendapat pembinaan	RSO.21..06.06					Pembuatan SOP Pelatihan / Pembinaan Jasa Konstruksi; pengelolaan SI Jasa Konstruksi;	Triwulan IV 2023	TW III	Pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi telah dilaksanakan. Sedangkan pembuatan SOP masih dalam proses pencarian rujukan yang sesuai dan akan diselesaikan pada tahun 2024.
5	Meningkatnya merusakkan jaringan drainase	RSO.21..06.06	30/06/2023	Persentase panjang jaringan drainase kondisi baik sebesar 75,70% (113,8316 KM)	Potensi rawan genangan		Pembuatan data genangan, Optimalisasi Prioritas penanganan, UPTD Teknis	Triwulan IV 2023	Optimalisasi penanganan sudah dilaksanakan dan Peran UPTD tejknis sudah berjalan, pembuatan data genangan dijadwalkan ulang pada tahun 2024	Optimalisasi Penanganan sudah dilakukan sepanjang 4301.4 Meter
6	Terdapat wilayah potensi rawan longsor	RSO.21..06.06					Optimalisasi Prioritas penanganan; mengefektifkan TRC pada UPTD Teknis pada wilayah rawan longsor	Triwulan IV 2023	TW I, II, III, IV	UPTD sudah berperan secara efektif pada penanganan wilayah potensi rawa longsor
7	Terdapat Obyek wisata yang belum	RSO.21..06.06	01/01/2023	kerusakan pada Jalan Akses Wisata	Terganggunya akses menuju OW	Dianggarkan melalui	Rekonstruksi jalan pada ruas jalan menuju OW	Triwulan IV 2023		

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
	terkoneksi oleh jalan kondisi baik (mendukung Aspek Destinasi Pariwisata)			Karanglo - Cipendok (No. Ruas 74) dan Jalan Baturraden - Serang (No. Ruas 62)	Baturraden dan OW Curug Cipendok	bantuan Gubernur TA 2023	Update data Jalan Kabupaten, Optimalisasi Prioritas penanganan, Optimalisasi peran UPTD Teknis	Triwulan IV 2023	TW III, IV	Tahap Perencanaan s/d Pemantauan pekerjaan fisik telah dilaksanakan pada akses jalan menuju Objek Wisata (al. Peningkatan Jalan Akses Wisata Karanglo - Cipendok, Peningkatan Jalan Baturraden - Serang)